
PROSES DAN ESKALASI KONFLIK DALAM PERISTIWA MALARI 1974 DI JAKARTA: SEBUAH TINJAUAN SEJARAH MIKRO

Ernita Nadya Wijaya
Universitas Negeri Surabaya
ernitanadya1112@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini mengkaji proses dan eskalasi konflik dalam Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 di Jakarta. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru, khususnya dominasi penanaman modal asing, maraknya praktik korupsi, serta rencana pembangunan proyek-proyek besar yang dinilai tidak mendesak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahapan pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber sekunder), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa yang semula berupa demonstrasi damai untuk menuntut pembubaran Asisten Pribadi (Aspri), penurunan harga, dan pemberantasan korupsi, akhirnya berubah menjadi kerusuhan dan perusakan massal. Perubahan ini dipicu oleh infiltrasi kelompok non-mahasiswa ke dalam barisan demonstran, serta diperparah oleh persaingan dan konflik kepentingan di antara elite militer, khususnya antara Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro. Pascakerusuhan, pemerintah Orde Baru menahan sejumlah aktivis mahasiswa seperti Hariman Siregar dan membangun narasi resmi yang menuduh elemen eks-PSI dan Masyumi sebagai aktor subversif di balik peristiwa tersebut. Kesimpulannya, Peristiwa Malari mengungkap kerapuhan stabilitas politik awal Orde Baru serta faksionalisme di tubuh militer, yang kemudian mendorong Presiden Soeharto untuk mengubah gaya kepemimpinannya menjadi lebih sentralistik dan menuntut loyalitas mutlak dari jajarannya.

Kata Kunci: Demonstrasi, Orde Baru, Mahasiswa

Pendahuluan

Pasca-peristiwa berdarah Gerakan 30 September (G30S/PKI), lanskap politik Indonesia mengalami guncangan hebat yang membuka jalan bagi transisi kekuasaan. Letnan Jenderal Soeharto memanfaatkan momentum kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan sosial untuk mengambil alih kendali pemerintahan melalui Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Secara hukum dan politik, surat perintah tersebut menjadi legitimasi absolut bagi Soeharto untuk mengambil tindakan apa pun yang dipandang perlu guna memulihkan ketertiban negara. Dampak politik dari Supersemar segera terasa secara cepat dan sistematis; sekitar 15 menteri yang dianggap sebagai loyalis Presiden Soekarno langsung ditangkap, Resimen Tjakrabirawa yang menjadi pasukan pengawal setia kepresidenan dibubarkan, dan seluruh media massa diletakkan di bawah pengawasan ketat Pusat Penerangan Angkatan Darat (Puspren AD) demi mengendalikan arus informasi (Sahasrad, 2020).

Rezim Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 ini kemudian mengubah total haluan politik-ekonomi Indonesia dengan bersandarkan pada konsep Demokrasi Pancasila. Berbeda dengan era Orde Lama yang berfokus pada retorika politik, Soeharto menggeser fokus negara menjadi stabilitas dan pembangunan ekonomi. Untuk merancang kebijakan ekonomi baru yang hancur akibat

hiperinflasi, Soeharto menggandeng sekelompok ekonom domestik lulusan Universitas California, Berkeley, yang kelak dijuluki sebagai "Mafia Berkeley". Kelompok ini menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat terbuka terhadap investasi asing dan utang luar negeri. Salah satu perubahan kebijakan yang paling mencolok adalah pelonggaran regulasi terhadap Caltex melalui UU Penanaman Modal Asing (PMA) 1967. Kebijakan karpet merah bagi modal asing ini sangat kontras dengan semangat kemandirian ekonomi (*Berdikari*) yang diusung Soekarno sebelumnya. Meskipun berhasil memicu pertumbuhan ekonomi makro yang pesat, rezim ini segera menuai kritik tajam karena dinilai subur dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menguntungkan lingkaran dalam Cendana.

Memasuki awal tahun 1970-an, gelombang perlawanan mulai mengkristal dari kelompok mahasiswa yang kecewa karena janji demokrasi Orde Baru justru berubah menjadi otoritarianisme militeristik. Melalui lembaga seperti Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), kalangan intelektual muda ini aktif mengkritik pembungkaman suara rakyat dan manipulasi politik. Untuk memperkuat gerakan, mereka membentuk Aliansi Segitiga, sebuah koalisi informal yang mempertemukan gerakan mahasiswa, elemen militer reformis yang tidak puas dengan komersialisasi jabatan, serta para teknokrat kritis. Aliansi ini bergerak bersama untuk mendorong perubahan mendasar dari dalam sistem pemerintahan yang semakin represif (Yogaswara, 2009). Ketegangan sosial mencapai puncaknya pada akhir tahun 1973 akibat dominasi modal asing Jepang yang mulai merambah dan menguasai berbagai sektor strategis hingga pasar retail domestik. Situasi ini kian memanas ketika pemerintah mengumumkan rencana kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, ke Jakarta pada Januari 1974. Bagi gerakan mahasiswa yang dipimpin oleh Hariman Siregar (Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia), kunjungan ini dipandang sebagai simbol nyata ketundukan pemerintah terhadap neo-kolonialisme ekonomi asing yang mengancam pengusaha lokal. Kondisi psikologis massa yang meradang ini menjadi pemantik utama bagi mahasiswa untuk mengonsolidasikan gerakan turun ke jalan (Van Dijk, 2018).

Demonstrasi yang semula direncanakan sebagai aksi protes damai menyambut PM Tanaka pada tanggal 15–16 Januari 1974 segera lepas kendali dan berubah menjadi kerusuhan massal yang dahsyat di Jakarta, yang kelak dikenang sebagai Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari). Selama dua hari, massa meluapkan amarah dengan membakar ratusan kendaraan buatan Jepang dan menjarah pusat perbelanjaan yang dianggap sebagai simbol konsumerisme asing (Wirajati, 2018). Meskipun komandan militer telah mengeluarkan peringatan keras, barisan mahasiswa tetap bertahan di lini depan. Pemerintah Orde Baru merespons aksi ini dengan tangan besi demi mengamankan muka Indonesia di mata internasional. Pasca-kepulangan PM Tanaka, aparat keamanan bergerak cepat melakukan operasi pembersihan, dan pada 1 Agustus 1974, Hariman Siregar resmi diadili serta dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan subversi.

Peristiwa Malari menjadi ujian terberat sekaligus titik balik penting bagi konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Guna mematikan benih-benih perlawanan di masa depan, pemerintah memperketat kontrol sosial secara drastis melalui pemberangusan sejumlah media massa kritis seperti surat kabar *Indonesia Raya* dan *Pedoman*, serta merancang kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) untuk mendepolitisasi mahasiswa. Di sisi lain, tragedi Malari juga membuka tabir persaingan faksi politik di internal militer, terutama antara Ali Moertopo (Asisten Pribadi Presiden) yang menggunakan pendekatan intelijen operasi khusus, dan Jenderal Soemitro (Pangkopkamtib) yang cenderung lebih akomodatif terhadap mahasiswa. Krisis ini berakhir dengan pencopotan Jenderal Soemitro dari jabatannya, yang secara otomatis membuat Soeharto berhasil memusatkan seluruh kendali komando militer dan intelijen secara mutlak di bawah genggamannya langsung untuk dua dekade berikutnya (Suwarta, 2018).

Temuan & Diskusi

Awal dekade 1970-an menjadi fase krusial bagi riwayat Orde Baru. Masa-masa awal yang akur antara pemerintah militer dan Masyarakat semula bahu-membahu menumbangkan Orde Lama, perlahan-lahan mulai berakhir. Pemerintahan Presiden Soeharto yang awalnya dijanjikan membawa angin segar demokrasi, mulai menunjukkan watak aslinya yang otoriter dan represif demi mempertahankan hegemoni kekuasaan. Soeharto mempersepsikan setiap riak protes dan demonstrasi massa bukan sebagai kritik membangun, melainkan sebagai gerakan subversif yang didesain secara sengaja untuk mendestabilisasi keamanan nasional (Sahasrad, 2020).

Ketegangan ini pun direspons pihak Istana dengan retorika ancaman yang gamblang. Sebagaimana dicatat oleh G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., Soeharto secara eksplisit mengeluarkan ultimatum untuk mengambil langkah koersif terhadap para penentanginya *“Saya pernah mengingatkan mereka bahwa saya tidak akan memberikan cara-cara yang tidak demokratis dan akan menindak dengan tegas bila mereka melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas nasional.”* Peringatan keras ini mencerminkan betapa tipisnya toleransi pemerintah terhadap oposisi, terutama karena rezim sedang berfokus penuh mengonsolidasikan kekuatan politiknya demi memenangkan Pemilihan Umum 1971 (Dwipayana & Ramadhan, 1989).

Agitasi Mahasiswa, Menggugat Korupsi di Tubuh Rezim Baru

Memasuki tahun 1970, ruang-ruang publik di Jakarta mulai dipenuhi oleh pamflet, poster, dan corat-corek dinding yang digelorkan oleh gerakan mahasiswa. Sebagai agen perubahan, mereka merasa dikhianati oleh realitas di lapangan; alih-alih bersih dari KKN, pemerintahan baru justru membiarkan praktik korupsi tumbuh subur dan sudah mendarah daging. Rasa muak terhadap perilaku koruptif para elite politik ini mendorong tokoh-tokoh mahasiswa progresif seperti Arief Budiman, Syahrir, dan Marsilam Simandjuntak untuk mengarsiteki sebuah wadah pergerakan konkrit yang dinamakan Komite Anti Korupsi (KAK). Resonansi gerakan KAK meluas dengan cepat ke berbagai daerah, termasuk Bandung. Para aktivis dari kota kembang berbondong-bondong mengorganisasi massa menuju ibu kota untuk memperkuat tekanan hukum. Sasaran utama mereka adalah institusi-institusi yang dianggap menjadi sarang penyelewengan dana negara, khususnya kantor Pertamina yang saat itu mulai menggurita sebagai "negara dalam negara" serta Kejaksaan Agung (Padiatra, 2015).

Melihat eskalasi protes yang kian membesar dan berpotensi memicu bentrokan terbuka, Soeharto memilih taktik persuasif-akomodatif untuk meredam suasana. Beliau mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdialog langsung di Istana Negara. Pertemuan ini menghasilkan sebuah konsensus politik berupa pembentukan Komisi Empat Anti Korupsi, sebuah lembaga *ad hoc* yang bertugas mengusut kasus-kasus penyelewengan wewenang. Untuk meyakinkan publik, komisi ini diisi oleh tokoh-tokoh bangsa bereputasi bersih dipimpin oleh Wilopo, S.H. (tokoh PNI), Mayjen Sutopo Juwono sebagai sekretaris, serta menempatkan mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai penasihat strategis. Nama-nama besar lain seperti I.J. Kasimo, Prof. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto juga dilibatkan demi memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat merosot tajam.

Protes atas Rekayasa Pemilu 1971

Di balik layar formal negara, rekayasa politik berskala besar sedang dijalankan oleh Ali Moertopo melalui Operasi Khusus (Opsus). Target utamanya adalah memenangkan Golongan Karya (Golkar) secara mutlak dalam Pemilu 1971 guna melegitimasi kekuasaan Soeharto. Melalui berbagai tekanan,

intimidasi birokrasi, dan mobilisasi aparaturnegara, misi tersebut berhasil. Golkar keluar sebagai pemenang tunggal yang mendominasi panggung legislatif. Namun, kemenangan mutlak ini menyisakan anomali besar dan memicu kecurigaan mendalam di kalangan masyarakat sipil mengenai integritas proses pemilu. Merespons kecurigaan yang kasat mata tersebut, sejumlah intelektual muda dan tokoh pergerakan menolak untuk tinggal diam. Figur-figur vokal seperti Adnan Buyung Nasution, Imam Waluyo, Jusuf A.R., dan J.C. Princen secara manifes memproklamasikan lahirnya gerakan Golongan Putih (Golput). Gerakan ini bukanlah bentuk apolitisme massal, melainkan sebuah aksi boikot pemilu yang dirancang secara sadar sebagai antitesis terhadap sistem elektoral 1971 yang dinilai cacat moral dan sarat manipulasi. Golput menjadi simbol perlawanan damai untuk menyatakan bahwa rakyat tidak sudi menjadi stempel legalitas bagi sebuah rezim yang curang (Hadi *et al.*, 2006).

Kemewahan di Tengah Kesulitan Rakyat

Di tengah krisis legitimasi yang mulai menggerogoti pemerintah, sebuah kebijakan kontroversial kembali digulirkan dari dalam Istana. Presiden Soeharto bersama Ibu Negara, Tien Soeharto, mengumumkan rencana pembangunan proyek raksasa Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Nilai anggaran yang diajukan tidak main-main untuk ukuran zaman itu, yakni menembus angka 10,5 miliar rupiah. Publik segera mencium adanya kejanggalan, mengingat ide proyek ini datang langsung dari inisiatif pribadi Ibu Negara yang nantinya juga diproyeksikan untuk memimpin yayasan pengelola komersialnya. Soeharto mencoba membela rencana tersebut di hadapan media, menyatakan bahwa tuduhan masyarakat tentang proyek mangkrak dan pemborosan uang negara adalah kekhawatiran yang mengada-ada (Wirajati, 2018).

Meski demikian, argumen sang presiden mentah di hadapan para teknokrat dan ekonom. Saat kondisi makroekonomi nasional masih tertatih-tatih akibat inflasi, memaksakan alokasi kapital yang begitu masif untuk proyek budaya dinilai sebagai miscalculasi kebijakan yang fatal. Kalangan rasional menuntut agar dana sebesar itu dialihkan untuk menghidupkan sektor riil dan mengentaskan kemiskinan. Ketegangan ini bahkan memicu pengunduran diri beberapa teknokrat yang menolak tunduk pada kemauan Istana, apalagi setelah mendengar target mutlak dari Ibu Tien bahwa proyek tersebut harus beroperasi penuh pada tahun 1975 (Jazimah, 2013).

Polemik ini menyalakan kembali api pergerakan mahasiswa pada awal tahun 1972. Aliansi mahasiswa Jakarta dan Bandung turun ke jalan membentuk Gerakan Akal Sehat (GAS) serta Gerakan Penyelamat Uang Rakyat. Mereka menyindir proyek TMII memiliki kemiripan watak dengan "Proyek Mercusuar" era Soekarno yang dahulu kerap dikritik oleh Orde Baru sendiri. Kritik tajam yang menysar sang istri membuat Soeharto naik pitam. Respons beliau kali ini sangat represif "*Saya tahu bahwa terdapat kelompok tertentu yang ingin membuat isu politik dari proyek yang kami cita-citakan. Kalau mereka tidak mengerti kalimat 'tidak akan saya biarkan', terus terang saja akan saya tindak.*" Di bawah bayang-bayang todongan senjata dan ancaman penjara, penolakan publik akhirnya diredam, dan proyek TMII tetap melenggang sesuai cetak biru awal yang dikehendaki Ibu Negara.

Krisis Beras dan Maladministrasi Bulog

Situasi sosial semakin memburuk ketika stabilitas ekonomi domestik dihantam efek domino dari lonjakan harga minyak bumi global. Inflasi meroket dan memicu krisis pangan serius, khususnya kelangkaan pasokan beras di pasar domestik. Kelaparan mulai menghantui kelompok masyarakat marjinal di berbagai daerah. Defisit suplai yang menyengsarakan isi perut rakyat ini mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dan salah urus (maladministrasi) di tubuh Badan Urusan Logistik (BULOG) selaku pemegang otoritas tunggal tata niaga pangan nasional.

Pada kuartal akhir tahun 1972, mahasiswa bersama rakyat kelas bawah mulai membongkar praktik penyelewengan struktural dan korupsi di internal Bulog. Krisis perut lapar ini menyatukan gelombang protes dari kaum teknokrat, masyarakat sipil, hingga mahasiswa yang kemudian melebur dalam aliansi Kelompok Gerakan Anti-Lapar. Mereka menggelar unjuk rasa di berbagai titik strategis, menuntut reformasi total pada lembaga logistik negara tersebut. Tekanan politik yang bergulir konstan dan masif ini akhirnya membuahkan hasil, memaksa Kepala Bulog saat itu, Jenderal Achmad Tirtosudiro, untuk meletakkan jabatannya pada akhir tahun 1972 (Lailah *et al.*, 2013).

Menggugat Kepemimpinan Nasional

Memasuki penghujung tahun 1973, atmosfer politik di Indonesia kian mendidih. Diskursus intelektual di ruang-ruang kuliah tidak lagi sekadar membahas masalah teknis ekonomi, melainkan sudah menukik pada akar masalah: gurita modal asing dan patologi korupsi yang kian meruncing di lingkaran dalam kekuasaan. Puncaknya terjadi pada malam tanggal 31 Desember 1973. Sebanyak 1.500 mahasiswa dari berbagai simpul pergerakan di Jakarta, Bandung, dan Padang berkumpul di pelataran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Aksi yang dikemas dalam bentuk malam tirakatan menjelang pergantian tahun itu diisi dengan orasi ilmiah, pembacaan puisi selebaran, dan kontemplasi atas krisis multidimensi yang melanda negara. Dalam waktu singkat, arah diskusi mengalami eskalasi yang radikal. Mahasiswa tidak lagi sekadar menuntut perbaikan harga beras atau transparansi modal asing; mereka mulai menyuarakan urgensi restrukturisasi total kepemimpinan nasional. Wacana untuk mengganti Soeharto dari kursi kepresidenan mulai menggelinging bebas di kalangan akar rumput pergerakan (Rauf & Maswadi, 1998).

Namun, menjelang dini hari, sebuah dilema politik yang besar mengemuka di tengah-tengah forum. Setelah bertahun-tahun rezim Orde Baru melakukan depolitisasi dan memotong generasi pemimpin sipil, muncul pertanyaan krusial yang sulit terjawab malam itu, siapakah tokoh alternatif di luar lingkaran militer yang memiliki keberanian moral serta kapabilitas konstitusional untuk maju menantang status quo Soeharto secara terbuka?. Kebuntuan mencari figur alternatif inilah yang kelak mewarnai dinamika politik nasional tepat sebelum meledaknya tragedi besar di bulan berikutnya, Januari 1974.

Rekonstruksi Historis dan Kronologi Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari)

Puncak ketegangan sosial dan politik yang berujung pada Peristiwa Malari ini terjadi dengan lebih cepat oleh momentum kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, ke Jakarta yang diagendakan pada 14 hingga 17 Januari 1974. Kunjungan diplomatik ini direspons oleh elemen mahasiswa melalui konsolidasi sistematis untuk menggelar aksi demonstrasi massal. Objektif utama dari mobilisasi massa ini adalah untuk merepresentasikan sebuah asersi politik bahwa bangsa Indonesia masih memegang teguh muruah serta kebanggaan nasionalnya, yang secara prinsipil tidak dapat dikooptasi oleh kekuatan kapital asing, khususnya hegemoni ekonomi dan penanaman modal dari Jepang (Agustina, 2014).

Pada tanggal 14 Januari 1974, faksi mahasiswa menginisiasi manifestasi protes di kawasan Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma sebagai bentuk penolakan langsung atas kedatangan Perdana Menteri Jepang. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa mengartikulasikan keresahan struktural masyarakat terkait penetrasi modal asing yang mengalir secara masif ke sektor ekonomi domestik. Terdapat sebuah persepsi kuat di kalangan demonstran bahwa eksploitasi kapital

oleh Jepang di Indonesia semata-mata diorientasikan pada akumulasi profit ekonomi sepihak, tanpa mengintegrasikan variabel kesejahteraan sosial bagi masyarakat pribumi. Pada fase ini, eskalasi demonstrasi masih berada dalam taraf moderat, mengingat para aktivis mahasiswa tengah mengonsolidasikan kekuatan penuh untuk aksi puncak yang dijadwalkan pada 15 Januari. Secara paralel, pergerakan ini juga mengkristalkan tuntutan politik yang dikenal sebagai Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) era 1970-an, yang mencakup urgensi pembubaran institusi Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta pemberantasan praktik korupsi (Djoened *et al.*, 2010).

Tanggal 15 Januari 1974 menandai titik Puncak dari perjuangan panjang perlawanan tersebut. Ajakan protes massal yang telah dikonseptualisasikan sebelumnya mulai dieksekusi secara terpusat. Gelombang demonstran, yang mayoritas direpresentasikan oleh elemen mahasiswa dari berbagai institusi pendidikan tinggi di Pulau Jawa, memusatkan titik kumpul di Sekretariat Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia guna mempersiapkan rute dan strategi aksi. Mobilisasi massa diinisiasi sekitar pukul 08.00 pagi, bertolak dari kawasan Salemba dan melakukan *long march* melintasi arteri strategis ibu kota meliputi Jalan Raden Saleh, Cikini, Gambir, dan Jalan Merdeka Timur dengan destinasi akhir Monumen Nasional (Monas). Sepanjang pergerakan, mereka secara konsisten menggaungkan dogma politik sentral yaitu bubarkan Aspri, turunkan harga, dan berantas korupsi (Agustina, 2014).

Dalam proses transisi pergerakan tersebut, kuantitas massa mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Partisipasi aksi tidak lagi eksklusif didominasi oleh kelompok intelektual mahasiswa, melainkan telah terintegrasi dengan elemen pelajar dan partisipan dari masyarakat sipil secara luas. Konfigurasi massa kemudian terpecah menjadi dua poros pergerakan utama satu faksi bermanuver menuju pelataran Monumen Nasional, sementara faksi lainnya bergerak ke arah Universitas Trisakti. Pada poros Monas, kelompok massa mendemonstrasikan penolakan simbolik dengan menurunkan atribut dan bendera penyambutan Perdana Menteri Tanaka. Akumulasi massa yang heterogen ini terus bertambah dan melebur menjadi sebuah entitas pergerakan massal yang masif.

Disusupi dan dirusak Gerakan Massal Di tengah konsentrasi ribuan demonstran, muncul kelainan struktural yang secara fatal mengacaukan kemurnian aksi mahasiswa. Sebagaimana dianalisis oleh, terdapat infiltrasi dari variabel-variabel eksternal yang berada di luar spektrum kendali panitia mahasiswa, yang mencakup kelompok preman, perusuh, dan elemen kriminogenik. Lebih jauh, kajian, mengidentifikasi adanya injeksi kapital sebesar Rp 30 juta dari seorang figur bernama Bambang Trisulo yang dialokasikan untuk memobilisasi premanisme bayaran. Di samping itu, Roy Simandjuntak, dalam kapasitasnya sebagai ketua persatuan pengemudi becak, turut mengerahkan armada tukang becak di episentrum Pasar Senen.

Entitas non-mahasiswa inilah yang kemudian mengorkestrasi demonstrasi menjadi tindakan anarkisme dan vandalisme. Mereka mengeksekusi pembakaran kendaraan bermotor, khususnya produk otomotif buatan Jepang, melakukan penjarahan aset komersial, membakar ban di fasilitas publik, serta mendestruksi infrastruktur fisik seperti kantor importir produk Jepang. Signifikansi kerusakan ini melampaui kapasitas kontrol Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, Hariman Siregar, mengingat desain awal pergerakan mahasiswa tidak pernah mengakomodasi metodologi kekerasan dan huru-hara (Pambudi, 2009).

Fenomena infiltrasi ini dikonfirmasi oleh temuan yang memaparkan kesaksian historis bahwa tragedi Malari banyak dikooptasi oleh kelompok non-intelektual, membenteng dari preman, pengemudi becak, hingga figur agama (kyai) yang didatangkan dari luar daerah. Terdapat hipotesis kuat bahwa oknum-oknum provokator tersebut merupakan instrumen yang disusupkan dan dikendalikan oleh faksi Ali Moertopo (Asisten Pribadi Presiden) untuk mendestabilisasi gerakan. Di sisi

lain, rival politiknya, Jenderal Soemitro yang menjabat sebagai Pangkopkamtib, justru diindikasikan memberikan kelonggaran operasional bagi demonstran. Manuver pembiaran dari Soemitro ini disinyalir sebagai kalkulasi politik agar eskalasi aksi tersebut dapat memantik amarah Presiden Soeharto sehingga berujung pada penyingkiran Ali Moertopo.

Intervensi Militer dan Buntut Peristiwa Merespons brutalisme massa yang telah keluar jalur, Jenderal Soemitro pada akhirnya mengintervensi konfrontasi dengan menemui demonstran guna mereduksi tensi konflik. Dalam negosiasi tersebut, Soemitro mengartikulasikan janji bahwa tuntutan-tuntutan normatif mahasiswa akan diakomodasi. Namun, pendekatan ini memicu ironi dan menjadi kontraproduktif ketika Soemitro mendatangi lokasi demonstrasi menggunakan kendaraan dinas produksi Jepang, yang secara psikologis justru kembali menyulut kemarahan demonstran. Kegagalan persuasi ini berujung pada ultimatum represif dari Soemitro, yang mengkategorikan aksi demonstrasi tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara (subversif). Ia mengancam akan mengerahkan kekuatan aparat keamanan secara penuh jika massa tidak segera membubarkan diri, didorong oleh kekhawatiran bahwa kerusuhan ini akan mendegradasi kredibilitas Presiden Soeharto di hadapan Perdana Menteri Tanaka (Wirajati, 2018).

Kekacauan kelompok terus berlangsung secara merata mengabaikan berbagai imbauan pasifikasi dari beragam organisasi. Hingga pada malam tanggal 16 Januari 1974, Hariman Siregar selaku Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri kepada otoritas kepolisian. Ia juga memfasilitasi siaran publik melalui medium televisi nasional guna mendeklarasikan secara resmi bahwa representasi Mahasiswa Universitas Indonesia menentang keras dan mengutuk segala bentuk kekerasan yang telah terjadi. Di samping Hariman Siregar, sejumlah aktivis mahasiswa dari Universitas Indonesia turut ditahan oleh aparaturnegara. Dampak fisik dan material dari kerusuhan masif ini sangat luar biasa; data statistik mencatat 11 korban jiwa, 300 individu menderita luka berat, 120 orang mengalami luka ringan, dan 775 demonstran direpresi di bawah penahanan kepolisian. Sementara itu, kerugian material mencakup destruksi terhadap 807 unit mobil dan 187 sepeda motor, kerusakan struktural pada 144 bangunan komersial, serta raibnya aset logam mulia seberat kurang lebih 160 kilogram dari sejumlah sentra perhiasan (Anonim, 1974).

Tuduhan Terhadap Eksistensi PSI dan Masyumi

Dalam literatur historis yang dikenal sebagai "Buku Kuning" berjudul *Peristiwa 15 Januari 1974* yang dipublikasikan dua bulan pasca-tragedi oleh Marzuki Arifin diekstraksi sebuah konklusi sentral mengenai adanya arsitek intelektual di balik kerusuhan tersebut. Narasi ini merepresentasikan perspektif resmi dan justifikasi negara yang menuding bahwa faksi eks-Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi merupakan dalang utama yang memprovokasi terjadinya Peristiwa Malari. Hal ini memberikan komprehensi mengenai pola pikir pemerintah Orde Baru dalam mengidentifikasi musuh politiknya. Kristalisasi Tuduhan Subversif Dinamika pasca-konflik berlanjut pada tanggal 28 Januari 1974, ketika Presiden Soeharto mengorkestrasi pertemuan strategis dengan representasi pimpinan partai politik dan Golkar. Dalam forum tersebut, negara memformulasikan diagnosis politik bahwa tragedi 15 Januari didalangi oleh oknum-oknum eks-PSI, Masyumi, dan faksi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dikendalikan oleh Ali Surachman. Entitas ini secara peyoratif dideskripsikan memiliki derajat bahaya yang "sama dengan bekas PKI" (Agustina, 2014)

Satu minggu sebelumnya, tepatnya pada 21 Januari 1974, Asisten Pribadi Presiden, Jenderal Ali Moertopo, telah mendeklarasikan bahwa peristiwa 15 Januari diklasifikasikan sebagai aktivitas subversif yang berkorelasi dengan upaya makar (kudeta). Ia menegaskan bahwa afiliasi politik PSI dan Masyumi bertindak sebagai operator di balik layar, dengan dukungan dari kekuatan ketiga, yakni

elemen PNI. Argumentasi ini kemudian diampifikasi dan dilegitimasi secara kelembagaan oleh Jenderal M. Panggabean selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan. Di sisi lain, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro turut melaporkan kepada Presiden mengenai adanya indikasi kuat keterlibatan pihak PSI dalam konstruksi Peristiwa Malari. Basis informasi ini diklaim bersumber dari jaringan informan intelijennya yang berada di Jawa Timur. Kendati demikian, karena validitas informasi tersebut masih bersifat hipotesis dan menggantung, Jenderal Soemitro belum sempat menerbitkan instruksi formal untuk mengeksekusi penangkapan terhadap figur-figur PSI yang dicurigai sebagai arsitek di balik tragedi tersebut.

Jejak Historis PSI-Masyumi sebagai Entitas Terlarang Elaborasi lebih lanjut dalam manuskrip Marzuki Arifin, memproyeksikan sebuah tesis bahwa PSI dan Masyumi merupakan entitas institusional yang secara kronis memiliki kecenderungan terhadap aksi-aksi makar, meskipun manuver mereka diklaim selalu menemui kebuntuan akibat absennya dukungan riil dari rakyat. Simpulan ini ditarik berdasarkan rekonstruksi atas rentetan peristiwa politik pasca-proklamasi kemerdekaan. Secara historis, Partai Sosialis Indonesia (PSI) memiliki keterikatan erat dengan tokoh-tokoh sentral seperti Sutan Syahrir. Kegagalan diplomasi Kabinet Syahrir dalam Perundingan Linggajati yang dipersepsikan sangat merugikan posisi teritorial Indonesia menjadi determinan utama pecahnya kelompok sayap kiri ke dalam dua faksi. Sutan Syahrir merespons hal ini dengan mendirikan PSI yang berhaluan sosialis demokratis, sementara Amir Syafruddin (diplomat dalam Perjanjian Renville) menginisiasi faksi sayap kiri radikal yang kelak bermuara pada meletusnya Pemberontakan PKI Madiun 1948.

Dalam dinamika politik selanjutnya, PSI diidentifikasi memiliki konvergensi kepentingan dengan Partai Masyumi, khususnya faksi yang direpresentasikan oleh Mohammad Natsir. Natsir yang memiliki relasi kompleks dengan sejarah gerakan NII di Sumatra Barat dikenal sebagai figur yang mensintesis idealisme sosialisme dengan nilai-nilai religius. Pemerintah mempersepsikan aliansi kedua partai ini sebagai sebuah koalisi yang ditujukan untuk mendirikan sistem pemerintahan berhaluan liberal. Guna merealisasikan agenda tersebut, PSI dan Masyumi dituduh terlibat dalam serangkaian manuver untuk meredefinisi ideologi Pancasila dan mengubah konstruksi UUD 1945. Kulminasi dari resistensi politik kedua institusi ini meletus melalui dukungan struktural terhadap gerakan separatis Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Semesta (Permesta) pada tanggal 15 Februari 1958. Sebagai konsekuensi atas keterlibatan masif dalam gerakan disintegrasi tersebut, Presiden Soekarno secara resmi melikuidasi dan membubarkan PSI serta Masyumi pada tanggal 17 Agustus 1960.

Dualitas Tujuan Subversif di Balik Peristiwa Malari Berdasarkan Narasi Resmi Pemerintah

Berdasarkan diskursus dan diseminasi informasi yang dikonstruksi oleh otoritas pemerintah Orde Baru, eskalasi Peristiwa Malari diproyeksikan sebagai manifestasi empiris dari manuver faksi-faksi oposisi yang memiliki tendensi makar untuk menggulingkan struktur pemerintahan yang sah. Narasi resmi negara mendalilkan adanya sebuah konspirasi politik terorganisasi yang diarsiteki oleh oknum-oknum eks-Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang menjalin koalisi strategis dengan elemen eks-Masyumi. Aliansi politik ini diklaim mendapatkan sokongan dari variabel ketiga, yakni entitas sosialis yang secara sistematis dan klandestin melakukan infiltrasi terhadap kader-kader muda dan kalangan mahasiswa. Objektif utama dari pendekatan ini adalah untuk mendistribusikan propaganda dan agitasi politik yang secara spesifik dirancang untuk mendiskreditkan serta mendelegitimasi otoritas pemerintah di mata publik. Lebih jauh, pemerintah memformulasikan hipotesis bahwa arsitektur pergerakan aliansi PSI-Masyumi ini beroperasi melalui jaringan yang ekstensif (Padiatra, 2015). Gerakan ini dituduh telah berhasil mengooptasi dan mendapatkan asistensi dari berbagai instrumen strategis, yang mencakup

keterlibatan institusi media massa sebagai amplifikator narasi, serta afiliasi dari sejumlah oknum sipil maupun faksi-faksi tertentu di dalam tubuh militer. Melalui mobilisasi massa yang terorkestrasi secara masif, konsolidasi kekuatan oposisi ini diproyeksikan untuk merealisasikan dua tahapan tujuan utama yang bersifat revolusioner.

Dekonstruksi Instrumen Kekuasaan Negara Tujuan fase pertama dari gerakan ini diorientasikan pada upaya likuidasi dan pembongkaran terhadap pilar-pilar penyokong kekuasaan elite Orde Baru. Target utama pada etape ini adalah melucuti legitimasi institusional dengan menuntut pembubaran lembaga Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, membekukan kewenangan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), serta mendesak penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI yang selama ini beroperasi sebagai instrumen kontrol sosiopolitik dan pertahanan negara. Sukses Inkonstitusional dan Transformasi Ideologis Pada fase kedua, pergerakan ini menargetkan eskalasi makar yang bermuara pada penggulingan Kepala Negara (Presiden Republik Indonesia). Tindakan subversif ini diklaim tidak hanya sebatas suksesi kepemimpinan, melainkan beriringan dengan agenda perombakan fondasi ketatanegaraan, yakni mendestruksi ideologi konstitusional Pancasila dan melakukan substitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konklusi dari konstruksi narasi pemerintah tersebut, muara akhir dari serangkaian agitasi politik ini adalah pencapaian tujuan ideologis yang pada dasarnya bersifat paradoks antara kedua kubu aliansi (Cahyono, 2014). Di satu sisi, faksi PSI diidentifikasi memiliki proyeksi politik pragmatis untuk merestorasi dan menginstitutionalisasi kembali sistem pemerintahan yang berlandaskan Demokrasi Liberal. Di sisi lain, faksi Masyumi dituduh memiliki agenda politik yang bersifat teokratis, yakni memanfaatkan momentum krisis untuk mentransformasikan konstitusi dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Ekskavasi Intelijen dan Pernyataan Resmi Laksamana Soedomo

Dalam upaya mendiseminasikan perspektif resmi negara, Kepala Staf Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), Laksamana Soedomo, menyelenggarakan konferensi pers untuk memaparkan lima temuan esensial terkait anatomi Peristiwa Malari (Agustina, 2014). Konklusi intelijen ini diekstraksi dari proses interogasi mendalam terhadap individu-individu yang ditahan atas dugaan kuat memiliki afiliasi dan signifikansi peran dalam kerusuhan tersebut. Kelima postulat temuan tersebut mengklasifikasikan bahwa:

1. Eksistensi Agenda Subversif, terdapat indikasi kuat mengenai manuver subversif yang dikonseptualisasikan berdasarkan landasan ideologi sosialisme. Agenda pamungkas dari gerakan ini diidentifikasi sebagai upaya inkonstitusional untuk menggulingkan rezim Orde Baru, merombak Undang-Undang Dasar 1945, serta mendekonstruksi Pancasila.
2. Stratifikasi Peran Operasional, pergerakan ini tidak terjadi secara sporadis, melainkan digerakkan melalui sistem pembagian kerja yang terstruktur. Anatomi organisasi aksi terbagi menjadi tiga klaster utama, yakni kelompok konseptor (perumus ideologi dan strategi), kelompok agitator (penggerak dan pemobilisasi massa), serta kelompok eksekutor operasional di lapangan.
3. Prakondisi dan Rekayasa Diskursus Publik, terdapat upaya sistematis dalam mematangkan prakondisi krisis di lapangan. Hal ini dieksekusi melalui penyebaran wacana apriori dan narasi negatif yang secara spesifik dirancang untuk mendiskreditkan kapabilitas pemerintah di sektor sosial, ekonomi, dan politik. Agenda agitasi ini juga mencakup kampanye hitam untuk mendelegitimasi institusi Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, Kopkamtib, serta doktrin Dwifungsi ABRI.

4. Eksploitasi oleh Faksi Ekstrem (Free-riding), teridentifikasi adanya manuver dari faksi-faksi ekstrem eksternal yang mengeksploitasi dan menunggangi momentum instabilitas tersebut, beroperasi dengan konsepsi serta sasaran politik mereka masing-masing.
5. Aktivitas Klandestin Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), ditemukan determinasi dari residu faksi ekstrem eks-partai terlarang yang menolak berintegrasi ke dalam sistem kelembagaan resmi negara. Mereka memilih untuk beroperasi secara klandestin melalui gerakan bawah tanah yang secara terminologis direpresentasikan sebagai Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).

Indikasi Afiliasi dan Sokongan Faksi Militer

Otoritas negara secara terbuka mengakui adanya anomali struktural di dalam institusi pertahanan, yang ditandai dengan keterlibatan sejumlah oknum militer dalam arsitektur pergerakan Malari. Narasi resmi pemerintah mendalilkan bahwa eks-faksi PSI dan Masyumi berhasil menggalang koalisi taktis dengan elemen militer, khususnya dari kalangan Angkatan Darat (AD). Fenomena ini direpresentasikan sebagai bentuk deviasi yang fatal terhadap doktrin Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; di mana para oknum tersebut diindikasikan mengalami demoralisasi akibat godaan syahwat kekuasaan dan ambisi jabatan politik. Dalam konteks ini, sorotan dan pengawasan paling tajam diarahkan kepada figur Jenderal Soemitro, yang saat itu menjabat sebagai Pangkopkamtib. Dengan kehati-hatian politik yang tinggi, pemerintah melontarkan kritik dan kecaman terhadap postur kebijakan Pangkopkamtib Soemitro, yang dinilai berkontribusi dalam mengakselerasi eskalasi ketegangan. Salah satu preseden yang disoroti adalah kritik Jenderal Soemitro terhadap fenomena "pemuda berambut gondrong", yang justru dipersepsikan sebagai katalis keresahan di kalangan generasi muda, sehingga secara tidak langsung menciptakan ruang hampa yang memfasilitasi terjadinya konsolidasi makar (Yogaswara, 2009).

Tuduhan Kooptasi Gerakan Mahasiswa oleh Simpatisan PSI

Sebagai instrumen sentral dalam mobilisasi massa, gerakan mahasiswa tidak luput dari tuduhan infiltrasi. Pemerintah memformulasikan hipotesis bahwa elemen mahasiswa telah dikooptasi oleh simpatisan Partai Sosialis Indonesia (PSI) melalui entitas Grup Diskusi Universitas Indonesia (GDUI). Kelompok diskusi yang diinisiasi pada tanggal 2 Juli 1968 oleh figur-figur intelektual seperti Dr. Soe Hok Gie, Heru Naskoro, Aulia Rachman, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Juwono Sudarsono, dan M.B. Gunadil ini distigmatisasi memiliki afiliasi dengan haluan sosialis. Lebih jauh, GDUI dituduh berfungsi sebagai inkubator ideologis bagi individu-individu yang mewarisi doktrin sosialisme PSI ala Sutan Syahrir (Lailah *et al.*, 2013). Analisis ini diperkuat oleh observasi C. Van Dijk, yang menyoroti kebetulan nomenklatur Sekretaris Jenderal GDUI, Sjahrir, yang identik dengan nama pendiri PSI.

Pemerintah juga menggarisbawahi korelasi struktural pasca-terpilihnya Hariman Siregar sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI). Terjadi sinergi institusional yang sangat harmonis antara DMUI dan GDUI, yang mana Hariman sendiri tercatat telah berintegrasi ke dalam keanggotaan GDUI sejak tahun 1972. Kecurigaan negara semakin terkristalisasi oleh fakta sosiologis bahwa Hariman merupakan menantu dari Prof. Sarbini, yang dilabeli sebagai salah satu tokoh sentral berhaluan sosialis. Akumulasi variabel ini mempertebal keyakinan pemerintah sebagaimana dikomunikasikan oleh Jenderal Ali Moertopo kepada Kepala Polri Widodo Budidarmo bahwa orkestrasi demonstrasi mahasiswa dikendalikan secara absolut oleh eks-partisan PSI yang berkolaborasi dengan elemen non-kampus. Kendati demikian, postulat mengenai konspirasi eks-PSI dalam menggulingkan rezim Orde Baru ini masih menyisakan ambiguitas historis (Hadi *et al.*, 2006).

Pembelaan dan Kesaksian Hariman Siregar

"Bukan itu tujuan kami!" merupakan deklarasi pembelaan yang dilontarkan oleh Hariman Siregar saat merespons interogasi Wakil Pangkoptik, Laksamana Soedomo, terkait tuduhan keterlibatan mahasiswa dalam desain kerusuhan 15 Januari 1974. Refutasi kategoris dari Hariman ini memicu konfrontasi psikologis, di mana pihak Kopkamtib mempersepsikan jawaban tersebut sebagai upaya apologi untuk mengelak dari tanggung jawab hukum. Sebagai konsekuensinya, Jenderal Soemitro secara instan menerbitkan surat perintah penahanan, yang secara ironis menjadikan Hariman Siregar sebagai Ketua DMUI dengan masa jabatan tersingkat dalam lintasan sejarah, yakni hanya beroperasi selama enam bulan (Van Dijk, 2018).

Dalam mengklarifikasi rasionalisasi demonstrasi pertengahan Januari 1974, Hariman mengartikulasikan bahwa pergerakan tersebut didorong oleh objektivitas kondisi sosioekonomi. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengabaikan kesejahteraan rakyat, membiarkan eskalasi harga kebutuhan pokok (sembako) yang tak terkendali, serta memonopoli privilese kekuasaan eksklusif untuk oligarki dan kroni terdekat (Didi, 2008). Atas dasar tersebut, koreksi struktural terhadap pemerintahan Orde Baru dipandang sebagai sebuah keniscayaan historis. Hariman menggarisbawahi bahwa demonstrasi tersebut murni merupakan manifestasi kekecewaan organik dan tidak terdeterminasi oleh intervensi aktor politik eksternal. Ia menyatakan bahwa insting pergerakannya bangkit ketika rezim Orde Baru yang secara historis mengklaim legitimasinya dilahirkan oleh rahim perjuangan mahasiswa justru mengalami deviasi yang sangat jauh dari khitah perjuangan awalnya.

Tuduhan sebagai Ekstensi Politik PSI

Dakwaan politis paling merugikan yang disampaikan kepada Hariman Siregar berpusat pada asumsi kedekatan ideologisnya dengan anasir PSI. Kampanye stigmatisasi ini sejatinya telah bereskalasi sejak momen inagurasinya sebagai Ketua DMUI. Indikasi ini termanifestasi melalui masifnya poster-poster anonim di lingkungan kampus yang menjelaskan bahwa Hariman beserta Sekjen GDUI, Sjahrir, adalah representasi dari "Antek PSI". Kelompok-kelompok oposan Hariman merasionalisasi tuduhan ini melalui bukti empiris kedekatan operasional antara Ketua DMUI dengan faksi GDUI, yang mereka asumsikan sebagai episentrum berkumpulnya simpatisan Sosialis. Pada konklusi peradilan, konstruksi narasi inilah yang dijadikan justifikasi untuk mengkriminalisasi Hariman atas perannya dalam Peristiwa 15 Januari 1974. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama enam tahun, yang dikurangi dengan masa penahanan preventif. Signifikansi vonis ini sebenarnya jauh lebih moderat dibandingkan tuntutan awal dari jaksa penuntut umum yang menghendaki kurungan selama dua belas tahun. Disparitas hukuman ini merefleksikan adanya defisit alat bukti material yang komprehensif selama proses peradilan, sehingga persidangan harus berakhir secara antiklimaks tanpa pernah menyingkap secara absolut siapa arsitek intelektual sesungguhnya di balik Tragedi Malari (Sahasrad, 2020).

Diskursus Suksesi Kepemimpinan: Wacana Pencalonan Soemitro

Kendati tuduhan makar secara formal ditolak, fakta persidangan mengungkap bahwa diskursus mengenai suksesi kepemimpinan nasional memang pernah bergulir di kalangan aktivis. Hariman Siregar mengakui bahwa ia sempat mengkalkulasi probabilitas untuk merestrukturisasi pucuk pimpinan negara dengan figur alternatif yang lebih progresif. Dalam proses penajakan tersebut, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Letjen (KKO) Ali Sadikin, pernah dikonfrontasi oleh Hariman mengenai kesiapannya untuk mengemban mandat sebagai Presiden Republik Indonesia apabila dikehendaki

oleh kehendak rakyat (Fatah & Eep Saefullah, 2010). Namun, dalam suasana politik yang lebih intim, nama yang paling direkomendasikan dan dijagokan oleh Hariman justru adalah Pangkopkamtib, Jenderal Soemitro. Fakta ini diperkuat oleh kesaksian Leonardo Tomaso, yang mendeklarasikan di muka pengadilan bahwa ia pernah mendengar secara langsung pernyataan Hariman terkait urgensi substitusi kepemimpinan dari Soeharto kepada Soemitro. Meskipun narasi ini sempat direfutasi oleh kolega-kolega Hariman, serangkaian dinamika politik yang terjadi kemudian secara implisit mengonfirmasi bahwa faksi mahasiswa yang dipimpin Hariman memang memiliki afeksi dan preferensi politik agar Jenderal Soemitro dapat menduduki kursi kepresidenan.

Implikasi Politis Dokumen Ramadi dalam Mendestruksi Karier Jenderal Soemitro

Kemunculan entitas yang dikenal sebagai "Dokumen Ramadi" dalam lingkup politik Orde Baru terbukti menjadi instrumen fatal yang secara instan mematikan trajektori karier kemiliteran dan politik Jenderal Soemitro. Kendati demikian, sebuah anomali historis mencuat ketika Soemitro secara kategoris merefutasi segala bentuk afiliasi maupun pengenalannya terhadap figur Ramadi. "Mendengar namanya pun saya belum pernah!" tegas Soemitro. Ia bahkan mendeklarasikan bahwa dirinya tidak pernah sekalipun melihat wujud fisik dari dokumen yang mengatasnamakan dirinya tersebut. Secara historis, Ramadi diidentifikasi sebagai seorang purnawirawan berpangkat Kolonel yang memiliki latar belakang keahlian di bidang Hukum Militer, lahir di Pontianak pada 12 Maret 1912. Nama Ramadi secara mendadak mencuat ke pusat perhatian publik menyusul penemuan sebuah dokumen rahasia yang secara eksplisit menarasikan proyeksi ambisi Jenderal Soemitro untuk melakukan makar dan menggantikan posisi Presiden Soeharto. Keterlibatan Ramadi sangat kentara mengingat namanya tercantum dengan jelas di dalam naskah dokumen kontroversial tersebut. Sebagai konsekuensi dari meletusnya Peristiwa Malari, Ramadi pada akhirnya ditangkap oleh otoritas keamanan dan diinkarserasi di balik jeruji besi (Fatah & Saefullah, 2010).

Berdasarkan tinjauan laporan hasil pemeriksaan, pada masa itu Ramadi tengah menduduki jabatan strategis sebagai Komisariss PT Ravitex, dan secara politik tercatat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) representasi Golongan Karya (Golkar) sejak tahun 1971. Dalam proses interogasi, Ramadi bersaksi dan menuduh bahwa Jenderal Soemitro telah memberikan konsesi dan angin segar bagi elemen mahasiswa untuk mengeksekusi serangkaian aksi demonstrasi. Lebih jauh, bersama seorang kolega bernama Jayusman, Ramadi mengklaim memiliki intensi untuk memfasilitasi Jenderal Soemitro dalam agenda merombak kabinet pemerintahan serta melakukan purifikasi terhadap jajaran menteri, yang secara spesifik menargetkan penyingkiran Ali Moertopo dan Sudjono Humardani. Akumulasi dari sikap moderat Soemitro terhadap eskalasi gerakan mahasiswa, kelambatannya dalam memitigasi huru-hara pada 15 Januari 1974, serta rumor afiliasinya dengan dokumen Ramadi, pada akhirnya mengonstruksi sebuah tanda tanya besar yang mendiskreditkan kredibilitas sang Pangkopkamtib di mata rezim.

Klarifikasi dan Refutasi Jenderal Soemitro terhadap Rekayasa Dokumen Ramadi

Dalam sebuah sesi wawancara komprehensif yang didokumentasikan oleh Tim Pustaka Utama Grafiti, Jenderal Soemitro dikonfrontasi oleh jurnalis mengenai validitas rumor yang menudingnya memiliki tendensi untuk merebut tampuk kekuasaan tertinggi negara. Merespons insinusi tersebut, Soemitro memberikan sanggahan yang sangat tegas: "Ndak ada! Ndak ada! Mereka tidak ada yang dapat mengonstruksikan bukti empiris bahwa saya memiliki ambisi untuk menjadi presiden. Jangankan menjadi presiden, ambisi untuk menggantikan posisi Jenderal Panggabean saja saya tidak punya."

Kendati demikian, diskursus publik mengenai ambisi kepresidenan Soemitro terlanjur teramplifikasi, khususnya ketika ia mulai menginisiasi penetrasi ke ranah akademik melalui serangkaian kunjungan kampus untuk berdialog secara langsung dengan elemen mahasiswa. Merespons polemik ini, Soemitro mengklarifikasi bahwa manuvernya memasuki ruang-ruang kampus semata-mata merupakan eksekusi atas mandat langsung dari Presiden Soeharto. Objektif utama dari mandat tersebut adalah untuk mengorkestrasi stabilitas dan mereduksi tensi kemarahan di lingkungan perguruan tinggi yang tengah mengalami eskalasi keresahan (Sahasad, 2020).

Rumor mengenai hasrat politik Soemitro ini kemudian diakselerasi dan distimulasi secara artifisial melalui kemunculan dokumen rahasia Ramadi. Dalam perspektif analitis Jenderal Soemitro, dokumen tersebut tidak lebih dari sebuah instrumen operasi intelijen (kampanye hitam) yang direkayasa oleh rival politiknya. Ia memparalelkan modus operandi kasus ini dengan rekayasa "Dokumen Gilchrist" yang memicu turbulensi politik pada prahara 1965 di era Orde Lama. Berdasarkan akumulasi data intelijen swasta yang berhasil dikompilasinya, Soemitro meyakini sebuah hipotesis bahwa Ramadi pada hakikatnya adalah operator lapangan yang dikendalikan oleh faksi Ali Moertopo, yang secara sengaja didesain untuk dikorbankan sebagai pion politik. Menurut elaborasi Jenderal Soemitro, terminasi terhadap peran Ramadi sengaja dilakukan oleh dalang utamanya guna mengeliminasi jejak konspirasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebelum tragedi meletus, Ramadi secara proaktif dan sistematis mendiseminasikan wacana kepada khalayak luas bahwa dirinya menyokong penuh Soemitro untuk melikuidasi kekuasaan Ali Moertopo dan Soedjono Humardani. Manuver psikologis ini sangat krusial diinterpretasikan sebagai sebuah rekayasa kondisi yang diciptakan untuk memanipulasi persepsi publik, sehingga tercipta ilusi seolah-olah Soemitro memiliki kebencian institusional dan personal terhadap faksi Ali Moertopo.

Transformasi Paradigma Kekuasaan: Babak Baru Konsolidasi Orde Baru

Hingga konstelasi politik kontemporer, kabut misteri yang menyelimuti arsitek intelektual di balik Peristiwa Malari 15 Januari 1974 belum sepenuhnya terkuak secara absolut. Melalui penelusuran historiografi yang komprehensif, dapat diidentifikasi bahwa tragedi ini merupakan kulminasi dari kompleksitas krisis multidimensional yang terakumulasi pada awal dekade 1970-an. Ledakan sosial ini dipantik oleh sinergi berbagai variabel: mulai dari degradasi kepercayaan publik terhadap keterpurukan kondisi makroekonomi, institusionalisasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sentimen xenofobia terhadap dominasi penanaman modal asing, hingga faksionalisme laten di dalam internal tubuh militer. Ditambah dengan infiltrasi agen militer ke dalam struktur pergerakan mahasiswa serta indikasi intervensi kekuatan geopolitik asing, seluruh permasalahan ini berkonvergensi menjadi sebuah anarki massal yang membunuh sejumlah sentra vital di Ibu Kota Jakarta. Meskipun skala kerusakan tersebut sangat masif dan mengejutkan, determinasi politiknya belum cukup memadai untuk menggulingkan hegemoni pemerintahan Presiden Soeharto (Dwipayana & Ramadhan, 1989).

Terlepas dari kegagalannya melakukan suksesi, Peristiwa Malari memberikan sebuah postulat krusial, apabila akumulasi kekecewaan absolut dari masyarakat sipil beresonansi dan berkolaborasi dengan manuver faksi militer, hal tersebut dapat memanifestasikan sebuah pergerakan radikal yang mengancam eksistensi kepemimpinan nasional. Mengevaluasi posisi militer dalam tragedi ini, Indonesianis Harold Crouch memberikan analisis bahwa institusi Angkatan Darat pada masa itu sejatinya berpijak di atas fondasi soliditas yang sangat rapuh. Kerapuhan struktural ini mengkristalisasi sebuah iklim persaingan yang teramat tajam antar-elite kemiliteran, yang dengan mudah akan tereskalasi dan mencuat ke ruang publik manakala negara dihadapkan pada situasi krisis. Sebagai

respons strategis, Presiden Soeharto menginterpretasikan Peristiwa Malari sebagai momentum katarsis sekaligus titik tolak untuk mentransformasi secara radikal gaya kepemimpinannya dalam mengelola sistem kenegaraan Orde Baru. Pada fase pasca-Malari, Soeharto mengimplementasikan mekanisme seleksi yang sangat rigid, di mana ia hanya merekrut dan mengakomodasi figur-figur dengan rekam jejak loyalitas absolut untuk menopang sirkulasi kekuasaannya. Struktur komando militer direorganisasi; para jenderal yang mayoritas direpresentasikan oleh faksi Divisi Diponegoro didesain secara sistematis agar memiliki ketergantungan patronase yang tinggi terhadap institusi kepresidenan. Hal ini memfasilitasi Soeharto untuk memonopoli seluruh rantai komando angkatan bersenjata. Dalam sistem *reward and punishment* yang patrimonial ini, loyalitas tanpa syarat akan dikonversi menjadi jaminan kesejahteraan dan privilese politik. Sebaliknya, sekecil apapun indikasi pembangkangan atau ketidaksetiaan yang ditunjukkan, figur tersebut akan disapu bersih dari arena kekuasaan tanpa kompromi, sebuah preseden yang kelak terbukti pada nasib politik Jenderal L.B. Moerdani di kemudian hari (Fatah & Eep Saefullah, 2010).

Simpulan

Puncak dari konfrontasi ini terjadi pada 15 Januari 1974, bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Mobilisasi massa mahasiswa menyambut kedatangan delegasi tersebut dengan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi publik melalui manifesto Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Secara konseptual, demonstrasi tersebut dirancang sebagai aksi pasifis dan non-kekerasan. Namun, dinamika di lapangan mengalami distorsi yang komprehensif akibat intervensi elemen-elemen tak terduga. Terdapat indikasi kuat mengenai infiltrasi kelompok preman dan agitator yang secara sistematis diorkestrasi untuk memprovokasi kerusuhan (riot) masif. Hipotesis yang berkembang mengindikasikan bahwa oknum-oknum provokator tersebut beroperasi di bawah instruksi Ali Moertopo, selaku Asisten Pribadi Presiden Soeharto. Resolusi dari kekacauan tersebut berujung pada penangkapan dan penahanan sejumlah tokoh mahasiswa serta individu yang terimplikasi dalam pusaran konflik (Hadi *et al.*, 2006).

Secara historis, pertanggungjawaban absolut atas meletusnya peristiwa 15 Januari 1974 ini masih menjadi diskursus yang belum terkonfirmasi secara definitif hingga saat ini. Narasi yang beredar kerap kali menyematkan tuduhan mengenai adanya penetrasi ideologis dari eks-simpatisan PSI dan Masyumi yang disinyalir menunggangi gerakan mahasiswa (*free rider effect*). Dalam proses peradilan pun, pihak penuntut umum gagal memberikan pembuktian empiris yang memvalidasi bahwa Hariman Siregar adalah inisiator utama atau aktor intelektual di balik kerusuhan tersebut. Selain itu, tesis yang mengklaim bahwa aksi massa ini merupakan upaya subversi (penggulingan kekuasaan) terhadap rezim Orde Baru dianggap tidak memiliki landasan argumentatif yang kuat. Eskalasi protes yang terjadi pada hakikatnya merupakan manifestasi akumulasi kekecewaan publik terhadap patologi sosio-ekonomi dan politik yang merebak pada awal dekade 1970-an.

Implikasi dari Peristiwa Malari menghasilkan kerugian material yang masif dan mendatangkan efek domino yang signifikan di berbagai sektor fundamental. Pada sektor ekonomi, insiden ini memicu reorientasi kebijakan yang secara gradual memperlihatkan tren perbaikan. Sebaliknya, pada dimensi politik, terjadi transisi sistemik; iklim politik yang semula cenderung akomodatif dan terbuka mengalami pergeseran drastis menuju sistem yang otoritarian. Rezim mulai menerapkan pendekatan represif, di mana setiap bentuk oposisi atau disensi terhadap pemerintah akan dihadapkan pada proses hukum. Sementara itu, dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional, Peristiwa Malari berimplikasi pada pengunduran diri Jenderal Soemitro dari posisinya sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Pasca-pengunduran diri tersebut, arsitektur

pertahanan dan keamanan negara mengalami restrukturisasi komprehensif guna memulihkan stabilitas nasional dan menciptakan ketertiban publik.

Referensi

- Agustina, W. 2014. *Massa Misterius Malari*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Anonim, 1974. Prahara Januari: Kunjungan Tanaka yang berakhir dengan api. *Tempo*, 3(47): 5–12.
- Cahyono 2014. *Pangkomkamtib Jendral Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Didi 2008. *Apakah Soeharto Pahlawan*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Van Dijk 2018. *Pengadilan Hariman Siregar*. Jakarta: Teplok Press.
- Djoened, Marwati & Poeponegoro 2010. *Sejarah Nasional Indonesia IV Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwipayana & Ramadhan 1989. *SOEHARTO: PIKIRAN, UCAPAN, DAN TINDAKAN SAYA*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Fatah & Eep Saefullah 2010. *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru Manajemen Konflik, Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. Jakarta: Burung Merak Press.
- Fatah & Saefullah, E. 2010. *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru Manajemen Konflik, Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. Jakarta: Burung Merak Press.
- Hadi, Wahyono, D. & Gayung Kusuma 2006. Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Jurnal Sosioteknologi*, 1(1): 40–50.
- Jazimah, I. 2013. MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 3(1): 9–34.
- Lailah, Aas & Syah, I. 2013. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974. *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 1(2): 11.
- Padiatra 2015. *Introduction To Malari : Dari Situasi, Aksi, Hingga Rusuh Pada Awal Orde Baru 1970 – 1974*.
- Pambudi 2009. *Supersemar Palsu Kesaksian Tiga Jendral*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rauf & Maswadi 1998. *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Sahasad 2020. The Malari 1974, Press and the Soeharto's New Order: A Historical Reflection on Student Movement in the Authoritarian Era. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4): 2796–2806.
- Suwirta 2018. Pers Dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru : Peristiwa MALARI Tahun 1974 Dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka Dan Indonesia Raya Di Jakarta. *Susurgalur Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 6(1): 73–98.
- Wirajati 2018. Mahasiswa Dan Malari Di Jakarta: Telaah Perilaku Kolektif Mahasiswa Indonesia 1973-1974. *Jurnal Lensa Budaya*, 13(2): 166–77.
- Yogaswara 2009. *Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari)*. Media Pressindo.